

**Persepsi Pelaku Usaha terhadap Efektivitas Program Simpan Pinjam pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
(Kasus: BUMDes Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)**

***Business Actors Perception of the Effectiveness of the Savings and Loans Program
at Village-Owned Enterprises (BUMDes)***

Fiqih Nurfiyani, Hana Indriana*, Rajib Gandi, Zessy Ardinal Barlan

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

*E-mail korespondensi: hanaindriana@apps.ipb.ac.id

Diterima: 05 Oktober 2023 | Direvisi: 15 Februari 2024 | Disetujui: 19 April 2024 | Publikasi Online: 11 Juni 2024

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the perception of business actors on the effectiveness of the savings and loans program at BUMDes Cikarawang. The study was conducted using a mix method with questionnaire instruments and interview guides. The respondent selection technique is carried out by simple random sampling technique. The results showed that the driving factors of social capital are the level of social jealousy and the level of understanding of business actors. While the inhibiting factors are the level of participation and the level of cooperation. The level of program effectiveness is moderate and the level of participation is the only factor that has a significant correlation with the level of program effectiveness.

Keywords: BUMDes, program effectiveness, social capital

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap efektivitas program simpan pinjam pada BUMDes Cikarawang. Penelitian dilakukan menggunakan mix method dengan instrumen kuesioner dan panduan wawancara. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong modal sosial terdiri dari tingkat kecemburuan sosial dan tingkat pemahaman SDM. Adapun faktor penghambat terdiri dari tingkat partisipasi dan tingkat kerja sama. Tingkat efektivitas program tergolong sedang dan tingkat partisipasi merupakan satu-satunya faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat efektivitas program.

Kata kunci: BUMDes, efektivitas program, modal sosial

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kelembagaan ekonomi pedesaan yang menjadi wujud upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan pedesaan. BUMDes yang dibentuk dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat dapat menjadi sarana dalam melakukan pemberdayaan dan mencapai kemandirian masyarakat. Pembentukan BUMDes telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Berdasarkan Pasal 5 dalam Permendesa PDTT tersebut, pembentukan BUMDes berangkat dari hasil musyawarah desa dan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Upaya BUMDes dalam melakukan pembangunan desa diaplikasikan melalui pembentukan program atau unit usaha yang didasarkan pada kondisi desa dan kebutuhan masyarakat. Program atau unit usaha yang dijalankan pun beragam, dapat berupa usaha simpan pinjam, agribisnis, usaha penyediaan sarana produksi pertanian, hingga usaha rumah kompos (Juwita & Ugang, 2019). Program yang banyak dijumpai dalam pengelolaan BUMDes adalah program simpan pinjam. Rorong & Rares (2022) juga menemukan bahwa program simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes Sengkanaung sudah tepat sasaran yaitu membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat yang memerlukan bantuan modal usaha, biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya. Program BUMDes tersebut juga efektif karena mampu membantu warga desa selaku penerima pinjaman dalam memenuhi kebutuhan mereka apabila terbebas dari permasalahan keuangan seperti adanya tunggakan, memiliki kepengurusan yang mampu berpikir kreatif dalam mengembangkan BUMDes. Keberadaan manfaat-manfaat program tersebut juga tentunya selaras dengan tujuan pendirian BUMDes yakni untuk mendorong peningkatan ekonomi desa serta mendorong peluang usaha ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Mekanisme pelaksanaan BUMDes sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk pembiayaannya juga telah didukung melalui pengalokasian dana desa. Namun, adanya mekanisme pelaksanaan dan permodalan tersebut tidak membuat setiap BUMDes mencapai keberhasilannya. Pengelolaan BUMDes seringkali mengalami kendala sehingga berhenti beroperasi atau mangkrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Satia & Sadono (2019) menemukan bahwa program pinjaman bergulir pada BUMDes Cilebut Barat memiliki efektivitas yang rendah karena sasaran program yang belum sesuai dan juga pelaksanaan program yang belum mencapai tujuan, yakni untuk meningkatkan kemandirian dan mengembangkan usaha milik masyarakat. Penyebab dari rendahnya tingkat efektivitas program dalam BUMDes di antaranya adalah kurangnya sosialisasi keberadaan BUMDes kepada masyarakat, kurangnya pelatihan terhadap pengurus BUMDes, dan rendahnya ketersediaan modal (Bahari & Nugraha, 2019). Terbentuknya modal sosial dalam sebuah masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kebiasaan yang dimiliki, kedudukan dan peran individu dalam masyarakat, tingkat pendidikan, serta kelas sosial dan kesenjangan ekonomi (Pamungkas & Priyadi, 2018). Menurut Zulpahmi et al. (2020), keberadaan modal sosial berupa jaringan yang dibangun dalam pengelolaan BUMDes memungkinkan terjadinya kemudahan mendapatkan dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudahan mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan BUMDes, perasaan ikut memiliki, dan terjaminnya pemenuhan kebutuhan pemanfaat BUMDes serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

BUMDes Cikarawang merupakan salah satu badan usaha milik desa yang berada di lingkaran kampus IPB. BUMDes Cikarawang didirikan pada tahun 2018 dan sudah berjalan selama 6 tahun. Namun, hasil peninjauan lapangan pada penelitian ini diketahui BUMDes tersebut hanya memiliki satu program dan belum adanya perluasan jejaring dalam implementasi program BUMDes tersebut sebagai salah satu elemen penting dalam membangun modal sosial dalam pengelolaan BUMDes. Menurut Putra (2015), untuk mengembangkan dan memperluas jejaring BUMDes membutuhkan modal sosial berupa kerja sama, solidaritas serta kepercayaan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kekuatan faktor pendorong dan faktor penghambat yang berhubungan dengan modal sosial pelaku usaha yang terlibat dalam BUMDes Cikarawang? Sejalan dengan itu, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor terkait modal sosial yang mendukung dan menghambat tingkat efektivitas program simpan pinjam dalam pengelolaan BUMDes Cikarawang dari persepsi masyarakat setempat.

Tentunya dalam upaya menjawab rumusan masalah perlu terlebih dahulu memahami konsep modal sosial dan BUMDes yang digunakan dalam penelitian ini. Modal sosial merupakan salah satu modal pembangunan yang melekat pada hubungan sosial di dalam masyarakat. Putnam (1993) menyatakan bahwa keberadaan modal sosial erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Putnam (1993) juga mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial

yang melekat pada masyarakat berupa sekumpulan norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial yang mampu menjadi pendorong dalam melakukan tindakan kolektif untuk mencapai kepentingan bersama. Modal sosial tidak hadir begitu saja di dalam masyarakat. Keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan. Basalama (2019) menyatakan bahwa faktor pendorong dan faktor penghambat pembentukan modal sosial terdiri dari; 1) partisipasi, yang merupakan wujud dari adanya kemauan individu untuk berperan aktif secara sukarela; 2) kerja sama yang dilakukan oleh individu-individu dan memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama; 3) kecemburuan sosial, suatu kondisi yang timbul akibat adanya kesenjangan dalam hubungan antarindividu; dan 4) pemahaman sumber daya manusia, pemahaman mengenai pengertian modal sosial dan manfaat keberadaannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kelembagaan ekonomi yang ada di pedesaan. Keberadaan BUMDes memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi pedesaan. Menurut Putra (2015), hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum mendirikan BUMDes adalah; 1) pendirian harus berdasarkan usulan dari pemerintah desa atau masyarakat desa; 2) BUMDes didirikan dengan melihat potensi dari usaha ekonomi lokal di desa; 3) memerhatikan sumber daya alam yang ada di desa; 4) memerhatikan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes; dan 5) kontribusi modal dari pemerintah desa baik berupa pembiayaan ataupun kekayaan desa untuk dikelola oleh BUMDes. Pembentukan BUMDes menjadi salah satu upaya membangun desa yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui pengembangan potensi desa. Puspita et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi petani di Desa Tanjungharjo melalui unit-unit usaha yang ada di dalamnya, seperti unit usaha pinjaman modal untuk usahatani padi.

Upaya pencapaian peningkatan pembangunan pedesaan dilakukan dengan membentuk banyak program, baik yang berasal dari pemerintah maupun program yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Pembentukan program-program tersebut memiliki berbagai macam tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan mereka. Keberhasilan dari program yang ada dapat diukur dengan melihat tingkat efektivitas program. Efektivitas didefinisikan sebagai suatu pengukuran terhadap kesesuaian hasil capaian dengan tujuan pembentukan program (Mardhatillah, 2021). Pengukuran efektivitas program dilakukan menggunakan indikator yang terdiri dari; 1) ketepatan sasaran, yaitu indikator untuk mengetahui kesesuaian dari peserta program dengan target sasaran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; 2) sosialisasi program, yaitu pengukuran terhadap pemahaman yang dimiliki peserta terkait program dan kemampuan pengurus dalam memberikan informasi mengenai program kepada peserta; 3) tujuan program, diartikan sebagai hasil akhir yang diperoleh setelah pelaksanaan program yang pengukurannya bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Efektivitas program juga memiliki keterkaitan dengan persepsi. Persepsi merupakan sebuah proses dalam mengidentifikasi dan memahami suatu hal atau kondisi yang terjadi di sekitar. Persepsi mampu menjadi stimulus yang kemudian menentukan tindakan seseorang. Riadi (2020) mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian dan penafsiran masukan-masukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. Menurut Sumarandak et al. (2021) dalam bukunya, persepsi sesungguhnya merupakan sebuah proses yang terjadi pada setiap orang dalam menerima pemahaman yang bersumber dari informasi mengenai lingkungannya yang ditangkap dan diproses melalui panca indera. Persepsi dapat membentuk penilaian seseorang terhadap sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses seorang dalam memahami suatu hal atau kondisi yang ada di sekitarnya dan dapat menentukan tindakan mereka terhadap hal atau kondisi tersebut.

Mengacu pada konsep di atas, maka hipotesis dari penelitian ini diduga terdapat hubungan yang nyata antara tingkat partisipasi, tingkat kerja sama, tingkat kecemburuan sosial, dan tingkat pemahaman sumber daya manusia dengan tingkat efektivitas program.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei dan didukung dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif berupa kuesioner.

Adapun metode survei digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor pendorong, faktor penghambat modal sosial, dan persepsi pelaku usaha terhadap efektivitas program dalam pengelolaan BUMDes. Singarimbun & Effendi (1989) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dilakukan guna memperdalam informasi yang diperoleh melalui pendekatan kuantitatif dengan memahami keadaan sosial secara mendalam. Pendekatan secara kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kasus untuk mendalami faktor pendorong dan faktor penghambat yang berhubungan dengan modal sosial pelaku usaha serta persepsi terhadap efektivitas program simpan pinjam.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BUMDes Cikarawang, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi penelitian tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan beberapa pertimbangan yaitu karena Desa Cikarawang merupakan salah satu Desa Lingkar Kampus IPB dan telah memiliki BUMDes sejak tahun 2018, namun sampai penelitian ini dilakukan BUMDes tersebut hanya memiliki satu program. Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023.

Teknik Penentuan Responden dan Informan

Responden pada penelitian ini merupakan para pelaku usaha yang mengikuti program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang yaitu sebanyak 40 pelaku usaha yang dipilih secara acak menggunakan teknik *simple random sampling* dengan mengacak nama responden melalui bantuan Microsoft Excel 2019. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang dipilih secara sengaja (*purposive*) terdiri dari Kepala Desa Cikarawang, Ketua BUMDes Cikarawang, dan Ketua BPD Cikarawang.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari 40 responden. Data primer diperoleh langsung dari responden dan informan melalui observasi langsung, survei, dan wawancara mendalam. Data primer juga didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan panduan terstruktur. Data sekunder diperoleh melalui informasi tertulis, data-data, dan literatur yang mendukung kebutuhan data mengenai fokus penelitian dan literatur terkait penelitian terhadap persepsi pelaku usaha terhadap tingkat efektivitas program simpan pinjam. Data sekunder ini juga bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berasal dari pengumpulan lembar kuesioner yang telah diberi pengkodean dan nilai pada jawaban, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2016 dan IBM SPSS 24.0 for Windows. Pengujian hipotesis akan dilakukan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* untuk melihat hubungan antar variabel dan signifikansi hubungan antar variabel tersebut. Penyajian data kualitatif diperlukan untuk mendukung data yang telah diperoleh secara kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada informan. Penyajian data kualitatif diperlukan untuk mendukung data yang telah diperoleh secara kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Menurut Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2019) proses analisis kualitatif dapat dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Modal Sosial Pelaku Usaha

Menurut (BPS, 2014), modal sosial terbentuk melalui hubungan sosial yang terjadi antarindividu di dalam sebuah masyarakat. Selain itu, pembentukan modal sosial juga bergantung pada aksesibilitas sumber daya yang ditentukan oleh keberadaan jejaring dan sumber daya manusia. Pada akhirnya, besaran modal sosial akan ditentukan oleh kemampuan sosial tiap individu. Basalama (2019) menyatakan bahwa tingkat partisipasi dan tingkat kerja sama menjadi faktor yang mendorong

terbentuknya modal sosial, sedangkan tingkat kecemburuan sosial dan tingkat pemahaman sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pembentukan modal sosial.

Tingkat Partisipasi. Tingkat partisipasi pelaku usaha diukur dengan melihat keterlibatan mereka dalam beberapa tahapan seperti kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, keikutsertaan pelaku usaha dalam rangkaian program dari awal hingga akhir, manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha, dan keaktifan pelaku usaha dalam memberikan kritik atau saran terhadap pelaksanaan program.

Tabel 1. Tingkat partisipasi pelaku usaha

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	7	17,5
Sedang	31	77,5
Tinggi	2	5,0
Total	40	100,0

Tingkat partisipasi pelaku usaha berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 77,5%. Tingkat partisipasi pelaku usaha yang tergabung dalam program simpan pinjam berada pada kategori sedang karena sebanyak 31 responden tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan program simpan pinjam khususnya pada pemberian kritik dan saran dalam perbaikan pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang. Selain itu, tingkat partisipasi pelaku usaha juga tergolong rendah karena pada awal pelaksanaan program tidak dilaksanakan sosialisasi yang terorganisir oleh pihak pengurus BUMDes kepada pelaku usaha. Namun meskipun begitu, informasi mengenai mekanisme pelaksanaan program tetap disampaikan oleh pengurus kepada pelaku usaha ketika mereka mengunjungi kantor BUMDes Cikarawang untuk mengajukan pinjaman.

“...setau saya kemarin ngga ada sosialisasi, saya juga dikasih tau ada program ini dari sodara.” (ETH, 49 tahun)

“ngga ada sosialisasi ngumpul ngumpul gitu dulu mah, kalo mau ngajuin ya langsung dateng aja ke BUMDes.” (JMS, 57 tahun)

Tingkat Kerja Sama. Pengukuran terhadap tingkat kerja sama dapat dilihat dari hubungan antar pelaku usaha, kesediaan pelaku usaha untuk saling bekerja sama, bertukar informasi, dan membantu sesama pelaku usaha yang mengalami kesulitan.

Tabel 1. Tingkat kerja sama pelaku usaha

Tingkat Kerja Sama	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	29	72,5
Sedang	6	15,5
Tinggi	5	12,0
Total	40	100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerja sama berada pada taraf rendah dan memiliki persentase sebesar 72,5%. Tingkat kerja sama pelaku usaha berada pada kategori rendah karena sebanyak 29 dari total 40 responden masih enggan untuk bertukar informasi ataupun mengajak orang lain mengikuti program. Hal tersebut dikarenakan mayoritas pelaku usaha tidak saling mengenal dan khawatir mendapatkan masalah jika orang yang diajak atau diberikan informasi mengenai program simpan pinjam tidak melakukan pelunasan dengan lancar.

Tingkat Kecemburuan Sosial. Tingkat kecemburuan sosial dalam penelitian ini diukur dengan melihat peranan pengurus BUMDes yang berlaku adil, perbedaan manfaat yang diperoleh pelaku usaha, dan perasaan iri terhadap sesama pelaku usaha yang tergabung dalam program simpan pinjam.

Tingkat kecemburuan sosial berada pada kategori rendah karena sebanyak 21 dari 40 responden tidak memiliki rasa iri terhadap responden lain meskipun terdapat perbedaan jumlah pinjaman

Tabel 2. Tingkat kecemburuan sosial pelaku usaha

Tingkat Kecemburuan Sosial	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	21	52,5
Sedang	18	45,0
Tinggi	1	2,5
Total	40	100,0

yang diterima. Perbedaan jumlah pinjaman tersebut memang sudah menjadi kebijakan dari program simpan pinjam. Para pelaku usaha telah menerima adanya perbedaan jumlah pinjaman yang diterima. Selain itu, para pelaku usaha tidak merasa iri karena mereka beranggapan bahwa setiap pelaku usaha yang mengikuti program simpan pinjam memiliki kebutuhan yang berbeda, kemampuan mereka dalam membayar kembali angsuran juga tentunya berbeda sehingga adanya perbedaan tersebut tidak menimbulkan perselisihan antar sesama pelaku usaha.

“...jumlahnya iya beda-beda tapi itu karena orang lain udah sering ngajuin jadi saya ngga ngerasa iri. Lagian juga butuhnya orang kan beda beda ya dek heheh kalo saya emang sanggup balikannya segitu.” (ONH, 45 tahun)

Tingkat Pemahaman Sumber Daya Manusia. Tingkat pemahaman sumber daya manusia pada penelitian ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki setiap individu pelaku usaha mengenai keberadaan modal sosial. Tingkat pemahaman SDM pelaku usaha mengenai modal sosial yang mereka miliki dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan terbentuknya modal sosial. Apabila individu memiliki pemahaman yang baik mengenai modal sosial maka mereka mampu memanfaatkan modal sosial tersebut dengan optimal, begitu juga sebaliknya. Pemahaman para pelaku usaha mengenai modal sosial dalam penelitian ini mencakup pemahaman mereka mengenai rasa kepercayaan dan kerja sama antar pelaku usaha dalam program simpan pinjam serta sanksi yang diterapkan dapat mendukung kelancaran program simpan pinjam.

Tabel 3. Tingkat pemahaman SDM pelaku usaha

Tingkat Pemahaman SDM	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	0	0,0
Sedang	3	7,5
Tinggi	37	92,5
Total	40	100,0

Tingkat pemahaman SDM pelaku usaha berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 92,5% karena sebanyak 37 dari 40 responden telah memahami dan menyadari keberadaan modal sosial yang mereka miliki. Para pelaku usaha menyadari bahwa modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran program. Seluruh responden juga menyatakan bahwa mereka mengetahui sanksi dalam pelaksanaan program simpan pinjam. Dalam program simpan pinjam ini, responden menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan oleh pengurus BUMDes bukanlah sanksi yang ditetapkan secara tertulis. Responden mengartikan sanksi sebagai konsekuensi yang harus diterima pelaku usaha apabila tidak dapat mengikuti pelaksanaan program simpan pinjam sesuai dengan aturan, dalam hal ini berupa tidak membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya. Tidak hanya itu, responden telah memahami tujuan dari adanya sanksi yang diberlakukan.

“...penting lah kita saling percaya, karena kalo udah dipercaya enak kita mau apa apa juga pasti dimudahin. Jadi kayak...oh si A mah amanah jadi kalo ada urusan pinjem gini gak susah nagihnya, gitu...” (ETH, 49 tahun)

“...sanksinya lebih kepada ini sih...kalau kita bayar cicilan pinjemannya kurang bagus, sering nunggak begitu.. nah itu nanti sulit buat ngajukan lagi karena dari Pak NPI juga di awal sudah wanti-wanti bayarnya kalau bisa yang lancar, kalau ngga nanti dipersulit karena utamain orang-orang yang bayarnya lancar...” (JMS, 57 tahun)

Kekuatan Modal Sosial Pelaku Usaha pada Program Simpan Pinjam

Kepercayaan. Kepercayaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat perasaan saling percaya yang dimiliki pelaku usaha kepada pengurus dan sesama pelaku usaha lainnya, kejujuran yang dimiliki pelaku usaha, dan sikap terbuka pelaku usaha dalam melaksanakan program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang. Fukuyama (1995) dalam Syahra (2003) menyatakan bahwa kepercayaan yang dimiliki seseorang memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai budaya yang dipegangnya serta mencerminkan tindakan mereka dalam bersikap sesuai dengan moral yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang tergabung dalam program simpan pinjam terlihat bahwa para pelaku usaha memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sesama pelaku usaha dan pengurus BUMDes. Bentuk kepercayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha ditunjukkan oleh sikap kejujuran mereka dalam pelaksanaan program simpan pinjam. Hal tersebut terlihat dari jawaban sebagian besar pelaku usaha yang telah membayar cicilan sesuai dengan tenggat waktu. Selain itu, responden juga bersikap terbuka dan komunikatif apabila mengalami kendala dalam membayar cicilan pinjaman. Ketika mengalami kendala seperti belum memiliki uang yang cukup untuk membayar cicilan para pelaku usaha akan langsung menghubungi pengurus BUMDes untuk memberikan kesempatan membayar di beberapa hari setelah tenggat waktu ataupun cicilan dibayarkan sekaligus dengan penagihan di bulan berikutnya.

Kepatuhan Norma Sosial. Menurut Junaidi et al. (2016), norma sosial terdiri dari sekumpulan nilai yang dimiliki dan dipahami bersama. Keberadaan norma sosial kemudian menjadi penting karena dapat menghindari terjadinya perselisihan akibat dari perilaku atau tindakan masyarakat yang tidak diinginkan. Tidak adanya norma sosial yang disepakati dalam masyarakat dapat menyebabkan seseorang bertindak sesuka hati karena tidak ada perasaan saling memiliki ikatan dengan yang lainnya (Syahra, 2003).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha pada program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang ditemukan bahwa terdapat norma sosial yang berlaku dalam pelaksanaan program. Pelaku usaha juga telah mematuhi norma sosial yang berlaku dalam pelaksanaan program simpan pinjam. Norma sosial yang disepakati dan dipatuhi oleh pelaku usaha di antaranya penetapan kategori atau tahapan jumlah pinjaman, waktu pelunasan pinjaman, hingga bunga 2% dari pinjaman. Selain itu, sanksi tidak tertulis berupa teguran bagi pelaku usaha yang memiliki riwayat pinjaman macet juga diterapkan oleh pengurus BUMDes.

Jaringan Sosial. Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang terbentuk di dalam kelompok atau komunitas. Jaringan sosial ini terdiri dari ikatan-ikatan kuat yang dihasilkan selama interaksi dengan kelompok atau komunitas berlangsung (Junaidi et al., 2016). Jaringan sosial dalam penelitian terhadap pelaku usaha pada program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang ini melihat hubungan antara sesama pelaku usaha dan pengurus BUMDes, relasi-relasi baru yang terbentuk setelah mengikuti program, serta kesediaan pelaku usaha untuk saling membantu dalam pertukaran informasi pada pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang.

Kekuatan jaringan sosial yang dimiliki pelaku usaha selama mengikuti program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang masih terbilang lemah. Hubungan antara sesama pelaku usaha memang tidak begitu kuat karena sebagian besar dari mereka mengaku tidak saling mengenal satu sama lain. Hal tersebut berakibat pada relasi yang dimiliki pelaku usaha selama mengikuti program simpan pinjam ini tidak banyak mengalami perubahan. Kegiatan pada program simpan pinjam sangat terbatas hanya berupa pengajuan dan pengembalian uang pinjaman di Kantor BUMDes Cikarawang. Tidak ada kegiatan yang melibatkan pelaku usaha secara kolektif sehingga tidak terjalin hubungan yang kuat antar sesama pelaku usaha. Hubungan yang tidak cukup kuat tersebut juga membuat para pelaku usaha ragu untuk sekadar bertukar informasi atau mengajak orang lain mengikuti program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang.

Analisis Hubungan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dengan Modal Sosial

Faktor-faktor yang menjadi pendorong terbentuknya modal sosial pelaku usaha pada program simpan pinjam adalah tingkat kecemburuan sosial yang rendah dan tingkat pemahaman SDM pelaku usaha mengenai modal sosial yang tinggi. Pelaku usaha telah memahami tujuan norma sosial yang ada pada pelaksanaan program dan telah menyepakati serta mematuhi adanya norma tersebut. Kesadaran mengenai adanya perbedaan jumlah pinjaman yang diterima juga membuat para pelaku usaha bersedia mematuhi norma sosial yang berlaku. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat terbentuknya modal

sosial pelaku usaha adalah tingkat partisipasi yang sedang dan tingkat kerja sama yang rendah. Para pelaku usaha tidak bersedia untuk saling bertukar informasi atau mengajak pelaku usaha lain bergabung dalam program dan menyebabkan tidak adanya perubahan relasi yang dimiliki pelaku usaha selama mengikuti program simpan pinjam. Tingkat partisipasi masih tergolong sedang akibat tidak adanya kegiatan yang melibatkan pelaku usaha secara kolektif, juga menyebabkan tidak terjalinnya hubungan yang kuat antar sesama pelaku usaha. Namun dalam penelitian juga ditemukan faktor lain yang mendorong terbentuknya modal sosial pelaku usaha yaitu kompetensi dan citra diri yang baik yang dimiliki oleh pengurus BUMDes Cikarawang.

Persepsi Pelaku Usaha terhadap Tingkat Efektivitas Program Simpan Pinjam

Tingkat Ketepatan Sasaran. Tingkat ketepatan sasaran merupakan pengukuran yang dilakukan dengan melihat sejauh mana kesesuaian dari peserta program dengan target sasaran yang telah ditentukan pada awal perencanaan program (Budiani, 2017). Tingkat ketepatan sasaran digunakan sebagai salah satu indikator karena dapat menunjukkan bahwa program dikatakan berjalan efektif dengan melihat sejauh mana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari sasaran yang dituju.

Tabel 4. Tingkat ketepatan sasaran program simpan pinjam

Tingkat Ketepatan Sasaran	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	12	30.0
Sedang	5	12.5
Tinggi	23	57.5
Total	40	100.0

Tingkat ketepatan sasaran program tergolong tinggi dikarenakan sebagian besar peserta program sudah sesuai dengan kriteria dari sasaran program yang telah ditentukan pada awal pelaksanaan program yakni merupakan warga Desa Cikarawang yang memiliki usaha kecil dan menengah. Berdasarkan data mengenai karakteristik responden, sebanyak 21 dari 40 responden pada saat penelitian ini dilakukan merupakan pelaku usaha dengan jenis usaha yang beragam. Jenis usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha didominasi dengan usaha jajanan anak-anak, warung kecil, dan kredit barang. Kemudian 5 dari 19 responden selain pedagang sebelumnya juga pernah memiliki usaha pada saat mengajukan pinjaman, namun karena beberapa hal saat penelitian berlangsung mereka sudah beralih ke profesi lain serta ada juga yang sudah tidak bekerja. Penyebab tersebut di antaranya adalah adanya pandemi dan kondisi tubuh yang tidak fit sehingga sering mengalami sakit karena sudah lanjut usia.

Tingkat Sosialisasi Program. Tingkat sosialisasi program digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat efektivitas program karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program dan menjadi salah satu penentu dari keberhasilan suatu program. Nugraha (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat efektivitas BUMDes berada pada taraf rendah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus mengenai keberadaan BUMDes. Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyebaran informasi terkait keberadaan program beserta informasi rinci lainnya yang dilakukan baik secara formal maupun informal.

Tabel 5. Tingkat sosialisasi program simpan pinjam

Tingkat Sosialisasi Program	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	3	30.0
Sedang	26	65.0
Tinggi	11	57.5
Total	40	100.0

Tingkat sosialisasi program berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 26 responden atau dengan persentase sebesar 65%. Tingkat sosialisasi program tergolong sedang karena pada awal pelaksanaan program simpan pinjam tidak pernah dilakukan sosialisasi secara formal oleh pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes Cikarawang hanya menyampaikan informasi terkait keberadaan program secara perorangan dari mulut ke mulut dan tidak menyelenggarakan sosialisasi yang terstruktur dan terencana. Selain itu, informasi awal mengenai keberadaan program simpan pinjam juga diperoleh pelaku usaha melalui tetangga ataupun kerabat mereka. Akan tetapi, meskipun tidak dilaksanakan sosialisasi formal

yang terstruktur mengenai keberadaan program simpan pinjam informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman tetap tersampaikan dengan baik kepada pelaku usaha yang bergabung dalam program simpan pinjam. Hal tersebut karena pada saat peserta datang ke Kantor BUMDes Cikarawang untuk mengajukan pinjaman, pengurus akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman kepada pelaku usaha.

Tingkat Pencapaian Tujuan Program. Pengukuran terhadap tujuan program dilakukan untuk mengetahui tujuan yang direncanakan sesuai dengan hasil pelaksanaan program (Budiani, 2017). Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan program simpan pinjam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha warga tetapi juga untuk membantu warga yang menghadapi kesulitan ekonomi agar terhindar dari pinjaman bank keliling.

Tabel 6. Tingkat pencapaian tujuan program simpan pinjam

Tingkat Pencapaian Tujuan Program	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	2	5.0
Sedang	20	50.0
Tinggi	18	45.0
Total	40	100.0

Tingkat tujuan program berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar 50%. Tingkat tujuan program berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa pelaksanaan program simpan pinjam telah mencapai tujuan yang direncanakan. Mayoritas responden berpendapat bahwa usaha mereka telah terbantu setelah mengikuti program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang. Bantuan yang dirasakan oleh sebagian besar responden di antaranya adalah penambahan modal usaha yang berdampak pada penambahan kuantitas barang yang diusahakan. Tujuan program berupa peningkatan kemandirian pelaku juga berhasil tercapai karena sebanyak 35 dari 40 responden menyatakan tidak bergantung dengan adanya program simpan pinjam dan bank keliling. Mereka menyatakan bahwa hanya akan mengajukan pinjaman jika memang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan dan terdesak.

Hubungan Kekuatan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dengan Persepsi Pelaku Usaha terhadap Tingkat Efektivitas Program Simpan Pinjam

Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Efektivitas Program. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa tingkat partisipasi yang sedang menyebabkan tingkat efektivitas program juga berada pada kategori sedang.

Tabel 7. Jumlah dan persentase responden berdasarkan hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat efektivitas program

Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha	Tingkat Efektivitas Program								Nilai	
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total		Koef. Korelasi	Sig.
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Rendah	2	5.0	4	10.0	1	2.5	7	17.5	0.365*	0.020
Sedang	1	2.5	16	40.0	12	30.0	29	72.5		
Tinggi	1	2.5	2	5.0	1	2.5	4	10.0		
Total	4	10.0	22	55.0	18	35.0	40	100.0		

Tingkat partisipasi pelaku usaha memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat efektivitas program. Hal tersebut diperkuat dengan temuan hasil uji korelasi *Rank Spearman* yang menunjukkan nilai signifikansi hubungan kedua variabel tersebut sebesar $0.020 < 0.05$. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil uji korelasi *Rank Spearman* adalah sebesar 0.365* sehingga sifat hubungan yang dimiliki antara tingkat partisipasi dengan tingkat efektivitas program lemah dan searah karena nilainya positif. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi pelaku usaha maka semakin tinggi juga tingkat efektivitas program simpan pinjam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Satia & Sadono, 2019) bahwa tingkat partisipasi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat efektivitas program khususnya pada

aspek tujuan program karena apabila penerima manfaat program terlibat aktif maka tujuan program berupa peningkatan ekonomi masyarakat akan semakin tercapai.

Hubungan Tingkat Kerja Sama dengan Tingkat Efektivitas Program. Setelah dilakukan penelitian tidak ditemukan adanya hubungan yang nyata antara tingkat kerja sama dengan tingkat efektivitas program.

Tabel 8. Jumlah dan persentase responden berdasarkan hubungan antara tingkat kerja sama dengan tingkat efektivitas program

Tingkat Kerja Sama	Tingkat Efektivitas Program								Nilai	
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total		Koef. Korelasi	Sig.
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Rendah	3	7.5	15	37.5	11	27.5	29	72.5	0.198	0.222
Sedang	1	2.5	3	7.5	2	5.0	6	15.0		
Tinggi	0	2.5	4	10.0	1	2.5	5	12.5		
Total	4	10.0	22	55.0	14	35.0	40	100.0		

Nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut adalah sebesar $0.222 > 0.05$. Artinya tidak ada hubungan yang nyata antara tingkat kerja sama dengan tingkat partisipasi program. Tingkat efektivitas program simpan pinjam sudah tergolong sedang meskipun tingkat kerja sama yang dimiliki pelaku usaha masih berada pada kategori rendah. Meskipun pelaku usaha tidak berkenan untuk bertukar informasi mengenai keberadaan program simpan pinjam di BUMDes, informasi tersebut tetap diperoleh pelaku usaha yang lain karena sosialisasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh pengurus BUMDes. Penyebaran informasi mengenai keberadaan program oleh pengurus BUMDes menyebabkan pelaku usaha dapat mengakses program sehingga ketepatan sasaran dapat tercapai. Selain itu, program simpan pinjam ini bersifat pribadi dan belum memiliki kegiatan kolektif yang membutuhkan kerja sama pelaku usaha dalam pencapaian tujuannya.

Hubungan Tingkat Kecemburuan Sosial dengan Tingkat Efektivitas Program. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan hubungan antara tingkat kecemburuan sosial dengan tingkat efektivitas program.

Tabel 9. Jumlah dan persentase responden berdasarkan hubungan antara tingkat kecemburuan sosial dengan tingkat ketepatan sasaran

Tingkat Kecemburuan Sosial	Tingkat Efektivitas Program								Nilai	
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total		Koef. Korelasi	Sig.
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Tinggi	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0.118	0.470
Sedang	1	7.5	11	27.5	6	10.0	18	45.0		
Rendah	2	2.5	11	27.5	8	25.0	21	52.5		
Total	4	10.0	22	55.0	14	35.0	40	100.0		

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi kedua variabel tersebut adalah sebesar $0.470 > 0.05$. Artinya, terdapat faktor lain yang menyebabkan pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang masih belum berjalan efektif. Para pelaku usaha telah memahami dan menyepakati adanya perbedaan jumlah pinjaman yang diterima karena hal tersebut disesuaikan dengan frekuensi pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali jumlah pinjaman yang diterima pelaku usaha tidak sesuai dengan tahapan yang telah disepakati di awal mengikuti program. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dana yang terbatas dan perputaran dana yang kurang lancar menjadi faktor yang menghambat efektivitas program.

Hubungan Tingkat Pemahaman SDM dengan Tingkat Efektivitas Program. Setelah dilakukan uji korelasi antara tingkat pemahaman SDM pelaku usaha dengan tingkat efektivitas program ternyata tidak ditemukan hubungan antara tingkat pemahaman SDM pelaku usaha dengan tingkat efektivitas program simpan pinjam.

Tabel 10. Jumlah dan persentasi responden berdasarkan hubungan antara tingkat efektivitas program

Tingkat Pemahaman SDM	Tingkat Efektivitas Program								Nilai	
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total		Koef. Korelasi	Sig.
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Rendah	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0.865
Sedang	0	0.0	2	5.0	1	2.5	3	7.5		
Tinggi	4	10.0	20	50.0	13	32.5	37	92.5		
Total	4	10.0	22	55.0	14	35.0	40	100.0		

Nilai signifikansi dari hubungan kedua variabel tersebut adalah $0.865 > 0.05$. Maka, tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pemahaman SDM pelaku usaha dengan tingkat efektivitas program. Tingkat pemahaman SDM pelaku usaha mengenai keberadaan dan manfaat modal sosial sudah tinggi namun ternyata hal tersebut belum mampu mendorong kelancaran pelaksanaan program karena tingkat efektivitas program masih tergolong sedang. Pelaku usaha telah memahami adanya sanksi tidak tertulis yang akan mereka terima apabila telat melakukan pembayaran angsuran, namun hal tersebut tidak lantas membuat seluruh pelaku usaha memiliki riwayat pengembalian pinjaman yang lancar. Nyatanya masih terdapat beberapa pelaku usaha yang telat melakukan pembayaran angsuran melebihi tenggat waktu dan berdampak pada perputaran dana di program simpan pinjam pada BUMDes Cikarawang.

KESIMPULAN

Faktor pendorong modal sosial yang dimiliki oleh pelaku usaha pada program simpan pinjam terdiri dari tingkat kecemburuan sosial yang rendah dan tingkat pemahaman SDM pelaku usaha yang tinggi. Sedangkan untuk faktor penghambat modal sosial terdiri dari tingkat partisipasi yang sedang dan tingkat kerja sama yang rendah. Namun dalam penelitian juga ditemukan faktor lain yang mendorong terbentuknya modal sosial pelaku usaha yaitu kompetensi dan citra diri yang baik yang dimiliki oleh pengurus BUMDes Cikarawang. Tingkat efektivitas program belum efektif karena masih tergolong sedang. Dari keempat faktor pendorong dan faktor penghambat, hanya tingkat partisipasi yang memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat efektivitas pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat partisipasi pelaku usaha maka semakin tinggi juga tingkat efektivitas program simpan pinjam karena keterlibatan pelaku usaha dalam memberikan kritik atau saran terhadap pelaksanaan program masih kurang sehingga berdampak pada belum efektifnya pelaksanaan program khususnya pada pencapaian tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang. Bagi peserta program simpan pinjam agar terlibat aktif dalam pelaksanaan program khususnya pada tahapan memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan program simpan pinjam yang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pengurus BUMDes. Bagi Pengurus BUMDes Cikarawang dapat berinovasi dengan mengembangkan pengelolaan kelompok yang lebih dinamis dan komunikatif untuk saling bertukar informasi, melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai keberadaan program beserta aturan-aturan yang ada dalam pelaksanaannya, menetapkan aturan yang tegas dan tertulis bagi peserta yang memiliki riwayat pinjaman macet sehingga perputaran dana pinjaman di BUMDes Cikarawang tidak bermasalah. Bagi Pemerintah Desa Cikarawang perlu melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Cikarawang dengan mengadakan rembuk bersama pengurus dan beberapa perwakilan peserta setiap bulan untuk memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan khususnya yang berkaitan dengan pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, R., & Nugraha, T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal MODERAT*, 5 (November), 2442–3777.
- Basalama, Z. (2019). Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi Pada BUMDesa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- BPS. (2014). *Statistik Modal Sosial 2014*. Badan Pusat Statistik. Jakarta (ID). <https://www.bps.go.id/publication/2016/10/03/67e4fcc2bf295324013567c7/statistik-modal-sosial-2014.html>.
- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Junaidi, Rosnita, & Kausar. (2016). Analisis Modal Sosial pada Keberdayaan Petani Karet (Studi Kasus Petani Karet Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Faperta*, 3(1).
- Juwita, D. R., & Ugang, Y. (2019). PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI MATA RANTAI UNIT USAHA (Studi Kasus Pada BUMDes Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah). *JURNAL MERETAS*, 6(2), 95–115. <https://jurnal.upgripk.ac.id/index.php/meretas/article/view/153/98>
- Mardhatillah, M. (2021). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jess.v5i1>
- Puspita, W. E., Nurhadi, E., & Mubarak. (2021). Partisipasi Petani, Efektivitas Program, dan Kontribusi BUMDES dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Agrienvi: Jurnal Ilmu Pertanian*, 15(1), 8–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36873/aev.2021.15.1.8>
- Putnam, R. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. In *Explorations in Economic History*. The American Prospect.
- Putra, A. S. (2015). Buku 7: Badan Usaha Milik Desa: Spririt Usaha Kolektif Desa. In *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Riadi, M. (2020). Persepsi (Pengertian, Proses, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi). *KajianPustaka.Com*.
- Rorong, A. J., & Rares, J. J. (2022). Efektivitas BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Meila Sari Arebaang. *Jurnal Administrasi Publik JAP No*, 120(120), 46–51.
- Satia, S. R., & Sadono, D. (2019). Partisipasi dan Efektivitas Pengembangan Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir BUMDES di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), 783–792. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.783-792>
- Setiyo Budi Pamungkas, & Priyadi, B. P. (2018). Analisis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Bitkom Research*, 63(2).
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Alfabeta.
- Sumarandak, M. E. N., Tungka, A. E., & Egam, P. P. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Monumen Di Manado. *Jurnal Spasial*, 8(2), 255–268.

Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.

Zulpahmi, Z., Badaruddin, B., & Humaizi, H. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *PERSPEKTIF*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3346>